



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H.ABD.RAHMAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 476399

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 760.000.000

1. Tanah Seluas 3444 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN
Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 10710 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN
Rp. 230.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/74 m2 di KAB / KOTA
BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/168 m2 di KAB / KOTA
BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 197.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 50C(T135HC) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000
2. MOTOR, YAMAHA 44D / SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SE88 / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA SIENTA 1.5 G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 618.780

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 957.618.780



III. HUTANG

Rp. 130.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 827.618.780

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.